

JAMBI MASA KOLONIALISME IMPERIALISME SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN SEJARAH: STUDY KASUS SISTEM PEMERINTAHAN BELANDA TAHUN 1615-1942

Siti Sholekhah¹, Reka Seprina²

*sitisholehasholeha47591@gmail.com*¹, *reka.seprina@unja.ac.id*²

*Pendidikan Sejarah, Universitas Jambi*¹²

Abstrak: Jambi merupakan salah satu wilayah yang tidak terlepas dari keinginan Belanda yang ingin menguasai Jambi seutuhnya dan menjadikan wilayah Jambi sebagai koloni di Asia Tenggara dengan menjadikan Jambi sebagai wilayah keresidenan, hal ini membawa Jambi mengalami perubahan dalam bidang pemerintahannya. Pemerintahan kolonial Belanda resmi menguasai Jambi ketika runtuhnya kesultanan Jambi, maka pada tahun 1906 berdiri keresidenan pertama di Jambi sehingga secara resmi Jambi dibawah pemerintahan kolonial Belanda. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana sistem pemerintahan Belanda di Jambi yang dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran pada mata pelajaran sejarah. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Belanda dapat dijadikan sumber pembelajaran khususnya sejarah. Sumber pelajaran memiliki peranan yang sangat penting bagi peserta didik karena dengan menjadikan sistem pemerintahan Belanda sebagai sumber pembelajaran dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa serta dengan belajar sejarah mereka akan mengenal sejarah yang terdapat dilingkungan sekitarnya.

Kata kunci: Kolonialisme, Imperialisme, Sistem Pemerintahan Belanda, Sumber Pembelajaran Sejarah.

Abstract: *Jambi is one of the areas that cannot be separated from the Dutch desire to fully control Jambi and make the Jambi region a colony in Southeast Asia by making Jambi a residency area, this brought Jambi to experience changes in the field of government. The Dutch colonial government officially controlled Jambi when the Jambi sultanate collapsed, so in 1906 the first residency was established in Jambi so that Jambi was officially under Dutch colonial rule. This research was conducted to examine how the Dutch government system in Jambi can be used as a source of learning in history subjects. This research is a qualitative research with a historical approach. The research method used in writing this article is descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the Dutch government system can be used as a source of learning, especially history. Learning resources have a very important role for students because by using the Dutch government system as a source of learning, they can foster a sense of love for the homeland for the nation and by studying history they will get to know the history of the surrounding environment.*

Keywords : *Colonialism, Imperialism, Dutch Government System, Historical Learning Resources.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 1615 dimasa kekuasaan Sultan Abdul Kahar, ada sebuah kapal Belanda yang bernama Japen Van Amsterdam mengunjungi Jambi dibawah pimpinan Abraham Streck dengan maksud agar mendapatkan izin untuk mendirikan *loji* dagang di Muara Kumpeh Belanda pertama kali datang yang dilakukannya adalah meyakinkan maksud baiknya oleh penguasa kerajaan Jambi, maka pada tahun 1616 berdirilah *loji* Belanda di Muara Kumpeh (Miftahurrahmat, 2018:37).

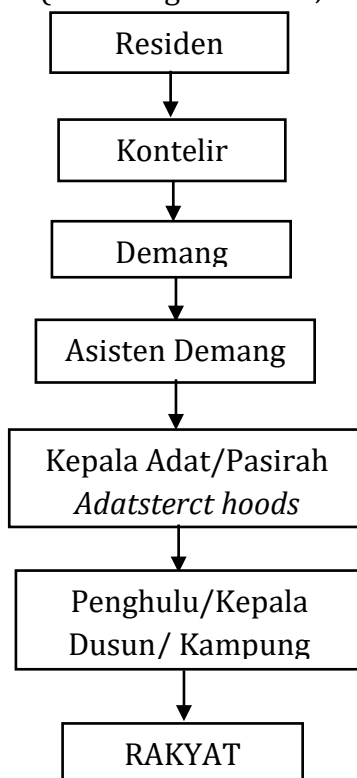
Pada saat itu maksud Belanda bukan untuk berdagang lagi, tetapi Belanda memikirkan rencana untuk menaklukan Jambi sepenuhnya. Maka cara Belanda dengan mendekati Jambi dan membantu perang antara Jambi dan Johor. Tahun 1667 pecahnya perang antara kesultanan Jambi dan kesultanan Johor, Jambi mengalami kemenangan karena adanya bantuan dari VOC. Setelah perang tersebut VOC melalui konsul dagangnya *Sybrand Swart*, meminta imbalan kepada Sultan Jambi karena telah membantu memenangkan peperangan. Menyusul kesepakatan yang ditandatangani oleh Belanda dan Kesultanan Jambi. Belanda menduduki wilayah Muara Kumpe. Dengan perjanjian yang telah disetujui, Jambi menjadi wilayah kekuasaan dan dilindungi oleh Belanda. (Reka Seprina, 2021:88)

Bentuk sistem pemerintahan yang diterapkan Belanda untuk menduduki Jambi pada waktu itu adalah membentuk Jambi menjadi wilayah keresidenan pada tahun 1906 yang ber-ibu kota di Jambi. Kebijakan sistem politik liberal Belanda saat berada di Jambi yang dimana Belanda menetapkan bahwa mereka mempersempit gaji masyarakat Jambi, baik dalam bentuk kompensasi buruh di peternakan maupun dalam bentuk sewa tibia. Kebijakan politik liberal Belanda membuat rakyat Jambi semakin miskin.

Di dalam Sistem politik liberal terdapat dua bentuk sistem politik lainnya pertama, sistem politik pintu terbuka dan kedua, sistem politik etis. Sistem politik pintu terbuka adalah gabungan strategi politik, militer. Serta ekonomi yang bertujuan buat memperoleh serta melindungi kekuasaan dengan metode memecah kelompok besar jadi kelompok- kelompok kecil yaang lebih gampang ditaklukkan Taktik Belanda untuk tetap bisa menguasai Jambi yaitu dengan cara menerapkan politik pintu terbuka. Kebijakan sistem politik pintu terbuka Belanda di Jambi, yaitu: pertama (1) Terdapat pemerintahan kesultanan di Jambi dan kekuasaan Sultan atau raja serta kekuasaan pangeran Putra Mahkota, Kedua (2), terdapat hubungan antara Sultan Jambi dengan sekitarnya, yaitu Sultan Palembang dan Sultan Johor.

Kebijakan politik etis Belanda di Jambi pada tahun 1901 Jambi di tempatkan di dasar kekuasaan keresidenan Belanda di Palembang pada saat timbulnya permasalahan suksesi serta pergolakan yang lain yang terpaut dan tahun 1904 Sultan Thaha gugur dalam melawan Belanda setelah itu kesultanan dikuasai oleh Belanda secara sepenuhnya dan pada saat itu juga Belanda mempersiapkan segalanya untuk membentuk Jambi menjadi wilayah keresidenan. Pada tahun 1906 Jambi resmi menjadi keresidenan dengan ber-ibukota di wilayah Jambi (Dea Anggreini, 2017).

Kebijakan pemerintahan Belanda pada waktu itu ialah menyatukan hukum masyarakat sesuai tempat tinggalnya, yaitu dengan cara menggabungkan beberapa desa yang mempunyai hukum yang sama, yang mempunyai daerah, harta, dan benda sendiri atau yang biasanya disebut dengan istilah marga. Koordinator pemerintahan di daerahnya yaitu pasirah kepala marga hal ini bertujuan agar marga dapat menjadi dasar bagi masyarakat Jambi dan dapat dimasukkan ke ikatan ketatanegaraan pemerintahan Belanda. Secara structural Pemerintahan Belanda pada waktu itu dapat digambarkan sebagai berikut: (Bambang Suwondo, 1979:46).



Bagan 2.1 Struktural Pada Masa Pemerintahan Balanda

Keterangan:

- Residen : Kepala *Gewest*/ Keresidenan
- Kontelir : Kepala *Afdeeling*/wilayah/kabupaten
- Demang : Kepala Distrik/ Kewedanan
- Asisten Demang : Kepala Onder Distrik/Kecamatan
- Kepala Adat :Kepala wilayah (desa) setempat yang kemudian setelah dikeluarkannya ordonansi desa dan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* dikenal dengan istilah marga/batin.

Jatuhnya Jambi ke tangan Belanda telah membawa serangkaian perubahan bentuk pemerintahan dan kekuasaan di Jambi, beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Belanda di Jambi yaitu Belanda yang menguasai Jambi banyak membawa perubahan, seperti pelaksanaan politik liberal di Jambi, dengan proses yang cukup panjang sejak awal kedatangan Belanda di Jambi. Dan sampai kolonial Belanda

menguasai Jambi. Hal ini terlihat dari Belanda yang menetapkan kota Jambi sebagai pusat pemerintahannya. (Miftahurrah, Aliyas & Rahyu Zami, 2022: 61). Selain itu, Belanda juga membawa perubahan, yaitu sebagai berikut: (1) Pertama di bidang politik, keberadaan politik liberal dan politik etis di Jambi dilaksanakan pemerintah Belanda. Belanda menetapkan Jambi sebagai pusat pemerintahan mereka. Kebijakan etis yang diterapkan oleh Belanda di Jambi adalah memperkenalkan kebijakan seperti pendidikan, irigasi, dan emigrasi, serta pemerintah Belanda memperkenalkan Pendidikan Barat dan membuka sekolah untuk penduduk asli; (2) Kedua, di bidang sosial budaya yaitu adanya westernisasi dan kristenisasi; (3) Ketiga pada bidang Ekonomi, Pemerintah Belanda membuka perkebunan, mengenalkan tanaman ekspor kepada masyarakat pribumi. (Reka Seprina, 2021: 88-89)

Menurut Wina Sanjaya (2017:228) sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan belajar yang digunakan untuk mengoptimalkan hasil belajar. Sumber belajar sendiri bersifat universal dan luas, artinya sumber belajar tidak hanya terpaku dari buku ataupun koran.

Sistem pemerintahan Belanda dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran sejarah terutama pada materi pembelajaran yang berhubungan dengan pengaruh barat dan Kolonial-Imperialisme yang terjadi di Jambi. Dengan menggunakan sumber belajar dari peninggalan Belanda di Jambi dapat membantu peserta didik dalam memahami materi sejarah dan membuat pembelajaran sejarah lebih menarik, lebih nyata dan menambah minat peserta didik pada pembelajaran sejarah serta membantu guru dalam mengembangkan bahan pembelajaran.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yakni jurnal dari Reka Seprina pada tahun 2021 dengan judul "*Study Perkembangan Perekonomian Jambi Masa Hindia-Belanda (1906-1942) Sebagai Bahan Ajar Pembelajaran Sejarah Berbasis Lokal*". Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jambi Vol.1 No.1 halaman 84-93. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi masa dapat digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran sejarah lokal dalam mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah peminatan. Bahan ajar ini sangat bermanfaat sekali bagi peserta didik dikarenakan materi yang dekat dengan lingkungan kehidupannya, sehingga menjadikan tujuan pembelajaran sejarah tercapai dan menjadi bermakna. Selain itu juga dapat membangun karakter cinta akan sejarah serta sifat tanggungjawab terhadap pelestarian, kepedulian akan warisan dan peninggalan sejarah serta penumbuhan rasa nasionalisme.

Berdasarkan paparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem pemerintahan Belanda yang dapat menjadi sumber pembelajaran sejarah. Karena pada dasarnya peristiwa aktual memang perlu dipelajari sebagai sarana untuk meningkatkan ketertarikan siswa pada pembelajaran sejarah. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi Sistem Pemerintahan Belanda guna bisa dijadikan sebagai sumber belajar sejarah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasarkan filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek secara ilmiah, disini peneliti merupakan sumber instrument kunci dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabung. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan pada makna generalisasi (Sugiyono, 2019:18). Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data dalam penelitian ini dapat diambil dari wawancara, catatan lapangan, foto, catatan pribadi atau dokumentasi lainnya (Moleong, 2017: 6).

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai peninggalan-peninggalan Belanda pada masa lampau dengan menganalisis sistem pemerintahan Belanda yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran sejarah. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis tentang studi Sistem Pemerintahan Belanda Tahun 1615-1942 sebagai sumber pembelajaran sejarah. Lokasi dari penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Jambi yang menjadi pusat pemerintahan Belanda pada saat itu dibawah keresidenan Belanda yaitu O.L.Helfrich.

Berdasarkan uraian di atas, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung tentang sejarah sistem pemerintahan Belanda. Selanjutnya melakukan metode studi Pustaka dengan mengumpulkan sumber-sumber seperti buku, literatur, dan catatan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi dokumentasi yang diperlukan dalam mempertajam hasil penelitian mengenai Sistem Pemerintahan Belanda sebagai sumber pembelajaran sejarah.

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan teknik analisis data. Analisis data merupakan upaya mengolah data menjadi informasi sehingga data tersebut mudah dipahami dan digunakan untuk pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (1992:16) ada tiga alur kegiatan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yakni seperti berikut: (1) Reduksi data, yaitu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa supaya dapat ditarik kesimpulan; (2) Penyajian data, yaitu suatu kegiatan membuat laporan hasil penelitian agar data yang dikumpulkan mudah dipahami dan di analisis; (3) penarikan kesimpulan, yaitu hasil akhir dari analisis data dan evaluasi dari penjelasan data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Masuknya Belanda ke Jambi

Tahun 1615 Belanda datang ke Jambi pada masa pemerintahan sultan pertama, yaitu Sultan Abdul Kahar. Pada tahun 1615 dibawah pimpinan *Onderkoopman* (wakil kepala perdagangan) Abraham Streck pertama kali, tiba dua

buah kapal dagang milik Belanda ke Jambi yaitu “*Wapen Amsterdam dan Middle Burg*”. Belanda datang ke Jambi awalnya sama dengan kedatangannya ke wilayah lain yaitu untuk mencari rempah-rempah dan hasil hutan. Dengan segala kelicikan yang dilakukan oleh pihak Belanda mereka akhirnya berhasil memonopoli perdagangan di Jambi. Belanda juga berhasil menduduki pemerintahan di Jambi. Abraham Streck berhasil mendapatkan izin untuk tinggal di Muara Kumpeh dengan cara yang licik dan berupa janji-janjinya. (Masjikuri,1979:13)

Pada tahun 1616 Belanda diberikan izin oleh Sultan Abdul Kahar untuk mendirikan loji di Muara Kumpeh di tepian sungai Batanghari, tetapi loji tersebut berfungsi sebagai benteng dari pada kantor dagangnya tersebut. Dimulailah suatu tatanan baru dalam sejarah Jambi setelah didirikan loji Belanda. Jambi sebelumnya berada dalam situasi tentram dan tenang, namun setelah kedatangan Belanda situasi itu berubah menjadi cemas dan terjadi kegelisahan karena Belanda ingin menjalankan sistem monopoli perdagangan yang dilakukan secara paksa dan tindakan yang semena-mena (Masjikuri,1979:13).

Belanda mendapatkan perlawanan dari rakyat karena tindakannya yang ingin memonopoli perdagangan dan keinginan untuk menanamkan kekuasaannya di Jambi. Perlawanan rakyat Jambi ini dipimpin oleh para sultan dan rakyat Jambi yang ingin mempertahankan kemerdekaan daerahnya dan ingin mengusir penjajah asing.

Sejak abad ke-17 Jambi diperintah oleh para sultan yang dilakukan secara turun-temurun. Tetapi setelah Belanda datang ke Jambi urusan pemerintahan dan pergantian sultan seringkali diatur oleh mereka. Mereka memanfaatkan situasi saat perselisihan Jambi dan Johor, hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi mereka di daerah Jambi. Perlawanan rakyat Jambi terhadap Belanda mulanya bukan perlawanan senjata, tetapi berupa pemboikotan dari penjualan hasil bumi. Hal ini dilakukan karena rakyat tidak puas terhadap sistem monopoli yang dijalankan Belanda di daerah Jambi. Tahun 1623 kantor dagang Belanda di Muara Kumpeh ditutup karena sikap rakyat Jambi yang tidak senang terhadap Belanda. (Masjikuri,1979:14-15)

Pada tahun 1904 Sultan Thaha gugur dan pada saat itu kesultanan Jambi runtuh dan dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Setelah berakhirnya kesultanan Jambi, Belanda menetapkan Jambi sebagai tempat tinggal dan memasukkannya ke dalam wilayah Belanda merdeka. Residen pertama adalah O.L. Helfrich, dilantik pada tanggal 2 Juli 1906, menurut Surat Keputusan Gubernur Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906. (Mubyarto,1990:31)

Pada masa pemerintahan Belanda, Jambi merupakan salah satu dari 10 pemukiman yang didirikan oleh Belanda di Sumatera Timur. Khusus di Jambi keresidenan yang beribukota di Jambi dibantu oleh dua orang asisten residen yang membantu mengoordinasikan beberapa *Onderafdeling*. Adapun residen yang pernah memerintah di Jambi dalam kurun waktu 1906-1942 adalah sebagai berikut: (Miftahurrahmat,2018:36).

1. O.L Helfrich dari tahun 1906-1908;

2. A.J.N. Engelenberg dari tahun 1908-1910;
3. Th. A.L Heyting dari tahun 1910-1913;
4. A.L. Kamerling dari tahun 1913-1915;
5. H.C.E. Qwaast dari tahun 1915 - 1918;
6. H.L.C. Petri dari tahun 1918-1923;
7. C. Poorman dari tahun 1923-1925;
8. G.J.Van Dongen dari tahun 1925-1927;
9. H.E.K. Ezerman dari tahun 1927-1928;
10. J.R.F. Verschoor Van Nosse dari tahun 1928-1931;
11. W.Tain Buch dari tahun 1931-1933;
12. Ph.J.Van Der Meulan dari tahun 1933-1936;
13. M.J.Ruyschaver dari tahun 1936-1940; dan
14. Reunvers dari tahun 1940-1942.

Jatuhnya Jambi ke tangan Belanda telah membawa serangkaian perubahan dalam pemerintahan dan kekuasaan Jambi. Salah satunya adalah munculnya kebijakan bebas dan etis yang diterapkan di ranah politik, Jambi. Sistem politik liberal adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah Belanda untuk mengatur kekuasaan di Jambi. Belanda menetapkan Jambi sebagai pusat pemerintahan Belanda.

Perkembangan Sistem Pemerintahan Belanda di Jambi (1615-1942)

Kemunculan Belanda di Jambi membawa dampak baru yaitu berupa pembaruan sistem politik yang ada di Jambi. Sistem politik dapat berupa kumpulan pendapat dan lain-lain yang membentuk suatu kesatuan yang saling berkaitan untuk mengarahkan pemerintahan dan melaksanakan serta memelihara pengendalian dengan cara mengendalikan hubungan antara orang satu dengan yang lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan bangsa-bangsa lain. (Lindayanti,dkk 2014:51).

Pada tahun 1643 masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil atau yang dikenal dengan depati Anom melanjutkan pemerintahan dari Sultan Abdul Kahar yang pada saat itu sedang terjadi konflik antara Jambi dan Johor. Dalam kondisi ini adanya tekanan dari VOC menjadi keterpaksaan Sultan Jambi melakukan kerjasama dengan Belanda dalam bidang ekonomi dan pemerintahan. Penandatanganan kontrak antara kesultanan Jambi dan Belanda merupakan sejarah yang sangat penting karena pertama kalinya sultan Jambi menandatangani perjanjian Belanda. Dengan demikian, inilah awal politik Belanda ikut mencampuri urusan pemerintahan kesultanan Jambi. Jambi pada saat itu juga berusaha untuk menaklukkan Johor dan dengan bantuan Belanda Johor pun dapat dikalahkan, maka dengan itu Belanda dibebaskan untuk mengembangkan misi politiknya sebagai balas budi. (Putri Sari Seibahar, 2021:43)

Sistem pemerintahan pada masa pendudukan Belanda menerapkan desentralisasi, birokrasi, dan feodalisme, hal ini untuk kepentingan politik kolonial, yaitu upaya penguasaan daerah dengan menduduki dan memanfaatkan potensi yang

ada di daerah dengan cara kekerasan dan perundang-undangan. (Wina Syandra Suryani,2021:54)

Asas pemerintahan Belanda adalah mempersatukan masyarakat hukum dengan menggabungkan beberapa desa kecil di daerah yang ada hukumnya dan yang daerahnya mempunyai milik sendiri, berdasarkan tempat tinggal masyarakat hukum tersebut. Oleh karenanya, susunan tata adat pada masa Belanda, masih memakai tata susunan pada zaman kesultanan, Belanda hanya menyesuaikan dengan politik penjajahannya.

Kebijakan pemerintahan kolonial pada saat itu untuk tidak menghapus sistem ketatanegaraan yang sudah ada. Pemerintahan kolonial menjalankan pemerintahan politiknya dengan kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat. Dalam menjalankan hubungan politik motif utama yang ditanamkan kolonial adalah pengaruh politiknya terhadap politik elite kerajaan. (Nur Laely,2017:5)

Pada tahun 1875 pemerintahan Belanda mengadakan perubahan tata cara dalam pemerintahan yang diwakilkan Jambi. Pada pertengahan tahun 1875, komandan garnisun dan utusan khusus dipindahkan ke residen. Dia menyarankan agar kepemimpinan politik tidak diserahkan kepada tentara, tetapi kepada pejabat dengan posisi asisten residen, maka keluar surat keputusan pemerintah adalah No.18 tanggal 28 Juni 1887. Ditetapkan bahwa klien sementara harus melakukan tugas politik di Jambi. Setelah Sultan Taha menolak menandatangani perjanjian untuk mendirikan pemerintahan di wilayah hulu Jambi, pemerintah Belanda melakukan perubahan politik terhadap Jambi, dan Sultan Taha meninggal pada tahun 1904. Belanda secara de facto berhasil menguasai Jambi. (Nur Laely,2017:2)

Di dalam Sistem politik liberal terdapat dua bentuk sistem politik lainnya pertama, sistem politik pintu terbuka dan kedua, sistem politik etis. Sistem politik pintu terbuka adalah gabungan strategi politik, militer. Serta ekonomi yang bertujuan buat memperoleh serta melindungi kekuasaan dengan metode memecah kelompok besar jadi kelompok- kelompok kecil yaang lebih gampang ditaklukkan.

Isi kebijakan pemerintahan Belanda pada saat itu, yaitu adanya perubahan sistem pemerintahan dari kesultanan menjadi keresidenan, kedudukan kesultanan pada saat itu diturunkan dan diganti dengan residen-residen, wilayah-wilayah kesultanan diambil alih oleh Belanda,dan Belanda mengirimkan para bupatinya ke daerah pedalaman.

Perubahan-perubahan sistem pemerintahan pada masa itu dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 1 Peristiwa politik tahun 1906-1920

No	Tahun	Peristiwa Sejarah
1	1906	Dari tahun 1906 sampai 1916, pemerintah pribumi mengalami beberapa kali perubahan reorganisasi pemerintahan, Jambi diperintah

		oleh lima orang penduduk yang masih muda dan belum berpengalaman.
2	1908	<i>Sistem onderafdeeling</i> di Kabupaten Bangko terdapat 161 dusun dengan jumlah kepala kampung 372 dan 15 distrik
3	1912	Pelaksanaan pemerintahan secara distrik setelah adanya sistem <i>onderafdeeling</i> yang terlalu luas kemudian dilakukan pengorganisasian. Sistem administrasi lama masa kesultanan dihapuskan saat Jambi dimasukkan ke wilayah Hindia Belanda
4	1914	Ketika masyarakat mengetahui bahwa pemerintah Belanda telah memperoleh otonomi dalam bentuk <i>gemeente read</i> (karya kota Madaia) untuk kepentingan penjajah, masyarakat bergejolak.
5	1915	Di Muara Tembesi <i>Sistem onderafdeeling</i> dibagi menjadi 3 distrik salah satunya yaitu dalam bentuk pengorganisasian pemerintah Belanda
6	1916	Departemen manajemen pemerintahan Federasi Nan Betigo Dalam dibagi menjadi 9 distrik, salah satunya adalah Muara Bungo, sehingga rumah-rumah penduduk di kawasan Muara Bungo terletak di tepi sungai.
7	1917	Pada masa keresidenan jumlah penduduk Jambi sebanyak 138.539
8	1918	Antara tahun 1914-1918 terjadi keresahan sosial masyarakat karena mengetahui otonomi dalam bentuk <i>gemeente read</i> (Tulisan Kota madya) diberikan pemerintahan Belanda untuk kepentingan penjajah
9	1919	Antara tahun 1914-1919 akibat terjadinya perang dunia I hal ini menyebabkan terjadi krisis ekonomi di daerah Jambi karena adanya krisis pangan terutama bahan makanan pokok seperti beras
10	1920	Banyak masyarakat yang pindah ke berbagai jalur yang ada akibat kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda.

(Sumber: Wina Syandra Suryani, 2021:5-6)

Adapun keuntungan yang di dapat oleh pemerintah Belanda yaitu hasil-hasil perkebunan rakyat mengalir untuk pemerintahan Belanda dan Belanda mendapatkan keuntungan yang besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah Belanda. Kemudian Belanda dapat memerintah di wilayah Jambi, menerapkan politik liberal dan bebas melakukan monopoli perdagangan serta menanamkan ideologi barat di Jambi.

Perkembangan ekonomi Jambi secara terus-menerus berlanjut setelah Belanda menerapkan kebijakan politik etis seperti pembukaan perkebunan dengan skala besar, pengenalan tanaman ekspor yang laris di pasar internasional, dan dimulainya penambangan emas dan minyak di Jambi. (Reka Seprina, 2021:89)

Perkembangan ekonomi di wilayah Jambi terus meningkat, termasuk Jambi sebagai pelabuhan ekspor produk-produk di pedalaman Minangkabau seperti emas, lada dan hasil hutan Jambi sendiri. Selain itu, di bawah pemerintahan kolonial Belanda, Jambi menjadi terkenal dengan hasil bumi lainnya seperti karet dan pertambangan minyak. Pada tahun 1920, ekonomi Jambi tumbuh, pemilik modal swasta masuk ke Jambi, dan tanahnya berkembang banyak digunakan oleh pemerintah dan swasta untuk membuka perkebunan ekspor. (Reka Seprina, 2021:89).

Masyarakat Jambi mengalami kesengsaraan akibat terjadinya depresi perekonomian pada tahun 1930-an. Perekonomian berangsur membaik pada tahun 1937 dengan melonjaknya permintaan karet sehingga Jambi kembali makmur, pada periode ini disebut juga dengan Zaman Kupon. (Reka Seprina, 2021:90).

Perkembangan di bidang sosial budaya yaitu adanya westernisasi dan kristenisasi. Kebijakan Belanda dalam mengatur terutama kepentingan agama Kristen dan juga menyebarkan gaya modernnya di Jambi (gaya hidup barat) seperti perjudian, candu dan lain-lain (Reka Seprina, 2021:89).

Kemudian Belanda bermaksud untuk menghapus gelar yang pernah dipakai oleh penguasa wilayah Jambi semasa memerintah di Kesultanan, hal ini dilakukan Belanda agar tidak membangkitkan semangat para penduduk untuk melakukan perlawanan kepada pemerintahan Belanda. (Putri Seibahar Sari, 2021:63)

Peninggalan Pemerintahan Belanda di Kota Jambi

1. Menara Air Tua

Pada tahun 1928 kolonial Belanda mendirikan salah satu Menara air di Jambi. Fungsi dari Menara ini untuk menampung air. Dahulunya, Menara ini digunakan sebagai tempat mengontrol dan mengintai para musuh yang kemungkinan akan lewat di daerah sungai Batanghari. Terdapat 3 bangunan yang ada di Menara ini yaitu terdiri dari 1 bangunan yang paling tinggi terdapat 3 tingkat, sebagai bangunan induk yang berada di posisi tengah, dan terdapat 2 bangunan yang rendah mengapit antara bangunan induk yang tinggi. Luas bangunan ini berdiameter 9,360 dan tingginya mencapai 24,150 m.



Gambar 1. Menara Air Tua Jambi

2. Masjid Agung Al-Falah

Tanah tempat berdirinya Masjid Agung ini pernah menjadi pusat kerajaan Melayu Jambi. Tetapi Belanda berhasil menguasai dan dijadikannya pusat pemerintahan

serta benteng Belanda pada tahun 1885. Bekas istana sultan dulunya dijadikan sebagai asrama tentara Belanda yang dipakai sebagai tempat pemerintahan keresidenan tahun 1906. Berdiri sebuah benteng mewah pernah berdiri di wilayah Masjid Agung Al-Falah ini, disepanjang jalan Museum Perjuangan Rakyat Jambi hingga SMPN 1 Kota Jambi sebagai bukti bahwa kekuasaan Belanda pernah bernaung di tanah pilih ini. Di era kemerdekaan hingga tahun 1970-an lokasi tersebut masih digunakan sebagai asrama TNI di Jambi.



Gambar.2 Masjid Agung Al-Falah

3. Makam Kerkhof Belanda

Makam ini sudah digunakan sejak zaman pemerintahan Belanda di Kota Sawahlunto. Sebagian besar nama yang dimakamkan di kompleks makam ini adalah nama Belanda. Jumlah makam yang diketahui saat ini mencapai 94 makam, ditambah 22 makam Kristen, dan beberapa di antaranya adalah makam Jepang yang terlihat dari abjad Hiragana yang tertulis di makam tersebut.



Gambar.3 Makam Kerkhof

4. Unja Pasar

Kampus UNJA “pasar” adalah kampus tertua di Jambi dengan luas 0,72 hektar dengan bangunan klasik peninggalan Belanda. Terletak di kawasan pasar (pusat bisnis dan perdagangan) Jalan Raden Mattaher, Kecamatan Pasar, Jambi. Saat ini menjabat sebagai pengelola Pengembangan Perguruan Tinggi (P2T) dan Penyelenggara Universitas Terbuka.



Gambar.4 Unja Pasar

5. SMPN 1 Kota Jambi

SMP Negeri 1 Kota Jambi dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda (tahun 1930-an) sebagai sekolah “Lager Onderwijs” (setingkat SD) dimana diprioritaskan siswa yang orang tuanya adalah birokrat di pemerintahan Belanda saat itu. Abdurrahman Sayuti (Gubernur Jambi), Kol.Abunjani, termasuk beberapa tokoh yang kini dipercaya menjadi pejabat di Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi.



Gambar.5 SMPN 1 Kota Jambi

6. Menara Air PDAM Jelutung, Jambi

Tahun 1928 penyediaan air minum di Kota Jambi sudah ada didirikan oleh Pemerintahan Belanda. Pemerintah pada waktu itu mendirikan menara air ini dengan kapasitas 7 liter/detik. Tahun 1975-1976 Instalasi Pengelolaan Air Benteng tahun 1928 yang awalnya dibangun dengan kapasitas 7 liter/detik secara bertahap meningkat menjadi 26 liter/ detik hingga menjadi 42 liter/detik.



Gambar.6 Menara PDAM Air Jelutung

Sistem Pemerintahan Belanda (1615-1942) Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah

Menurut Anitah (dalam Prastowo, 2018:28) sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar. Sementara itu menurut Winarsih,dkk (2017:2) pembelajaran sejarah merupakan media Pendidikan yang paling ampuh untuk memperkenalkan kepada peserta didik tentang bangsanya di masa lampau. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah harus melibatkan lingkungan disekitar peserta didik. Seperti sistem pemerintahan Belanda di Jambi yang dapat menjadi sumber pembelajaran.

Sistem pemerintahan pada masa kolonial Belanda ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar sejarah. Seperti yang kita ketahui sumber belajar sejarah hingga masa sekarang ini masih banyak menggunakan media cetak baik buku paket atau LKS dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sejarah yang demikian tentunya akan menimbulkan rasa jenuh bagi peserta didik yang akhirnya pembelajaran sejarah kurang tertarik bagi peserta didik.

Dengan memanfaatkan pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal atau mencakup wilayah Jambi dapat memberikan efek yang positif bagi peserta didik. Sistem pemerintahan Belanda di Jambi dijadikan sebagai sumber pembelajaran sejarah Indonesia maupun sejarah peminatan yang secara tidak langsung para pendidik berperan dalam meningkatkan rasa cinta dan nasionalisme di dalam diri peserta didik.

Sistem Pemerintahan Belanda merupakan salah satu sumber pembelajaran yang bisa dimasukkan dalam sumber belajar lokal berdasarkan kurikulum darurat 2020 pada mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Sejarah Peminatan, khusus materi KI dan KD yang berkaitan dengan kolonialisme dan imperialisme Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Kompetensi Inti:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, Kerjasama, cinta damai, reponsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Tabel 2 Kompetensi Dasar Kurikulum Darurat 2020 Pada Mata Pelajaran Sejarah

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif berdasarkan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Sumber:2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD,DIKNAS dan DIKMEN

Adapun Kompetensi Dasar pada mata pelajaran Sejarah Indonesia memuat materi yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Belanda di Jambi diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3 Kompetensi Dasar Pada Mata Pelajaran Sejarah Indonesia kelas XI

KOMPETENSI DASAR		
Sejarah Indonesia	Materi Pokok	Materi Berbasis Lokal
3.1 Menganalisis kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, serta dampaknya bagi bangsa Indonesia 4.1 Menyajikan hasil penalaran kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, serta dampaknya bagi bangsa Indonesia dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelajahan Samudra • Kedatangan Bangsa Barat di Indonesia • Perluasan Kolonialisme dan Imperialisme Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang kedatangan Belanda ke Jambi 2. Perkembangan Pemerintahan Belanda di Jambi (1615-1942) 3. Peninggalan bangunan pada masa Kolonial Belanda di Jambi

<p>bentuk lisan, tulisan, dan/atau media lain</p> <p>3.2 Menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) sampai dengan abad ke-20</p> <p>4.2 Mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) sampai dengan abad ke-20 dan menyajikannya dalam bentuk tulisan, dan/atau media lain.</p>	<p>Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlawanan bangsa Indonesia menghadapi Portugis dan Spanyol • Perlawanan bangsa Indonesia menghadapi pemerintah Hindia Belanda 	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber:2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD,DIKNAS dan DIKMEN

Selain mata pelajaran sejarah Indonesia, Kompetensi Dasar pada mata pelajaran Sejarah peminatan juga memuat materi berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Belanda di Jambi diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4 Kompetensi Dasar Pada Mata Pelajaran Sejarah Peminatan Kelas XI

Sejarah Peminatan	Materi Pokok	Materi Berbasis Lokal
<p>3.3 Menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa antara lain Renaissance, Merkantilisme, Reformasi</p>	<p>Peristiwa di Eropa yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renaissance, Merkantilisme, dan Reformasi Gereja di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang kedatangan Belanda ke Jambi 2. Perkembangan Pemerintahan Belanda di Jambi (1615-1942) 3. Peninggalan bangunan

<p>Gereja, Aufklarung, Revolusi Industri dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia pada masa kini</p> <p>4.3 Menyajikan hasil penalaran dalam bentuk lisan, tulisan, dan/atau media lain tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa antara lain Renaissance, Merkantilisme, Reformasi Gereja, Aufklarung, Revolusi Industri dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia pada masa kini</p>	<p>Eropa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufklarung dan Revolusi Industri di Eropa 	<p>masa kolonial Belanda di Jambi</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Sumber:2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD,DIKNAS dan DIKMEN

Berdasarkan kurikulum darurat 2020 diatas Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Sejarah Indonesia dan Sejarah Peminatan terdapat materi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan peninggalan-peninggalan masa Kolonial belanda di Jambi. Pembelajaran berbasis sejarah lokal ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran sejarah karena berhubungan dengan sekitar lingkungan peserta didik.

KESIMPULAN

Pada tahun 1906 berdirilah keresidenan pertama di Jambi sehingga secara resmi Jambi berada dibawah pemerintahan kolonial Belanda, maka dengan ini membawa perubahan besar bagi Jambi dari segi politik, ekonomi, sosial-budaya dan pemerintahannya. Sistem pemerintahan Belanda di Jambi ini merupakan sejarah yang perlu dipelajari dan diketahui oleh generasi penerus sekarang. Dengan mempelajari mempelajari sejarah bangsa maka,peserta didik akan mencintai tanah airnya. Oleh karena itu sistem pemerintahan Belanda di Jambi ini dapat menjadi bahan ajar pada

mata pelajaran sejarah dan diterapkan sesuai dengan KD dan materi yang berhubungan dengan sistem pemerintahan Belanda. Pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dapat memberikan wawasan bagi peserta didik dalam mengenal lingkungan sekitarnya yang memiliki sejarah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya peserta didik untuk lebih mengenal lingkungan sekitarnya dan lebih baiknya apabila terdapat buku ajar untuk pendidik maupun peserta didik yang berkaitan dengan sistem politik pemerintahan Belanda di Jambi ataupun buku sejarah lokal lainnya untuk menjadikan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Suwondo. (1979). *Sejarah Kebangkitan Nasional Di Daerah Jambi*, Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Department Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Fatmiyatun, Sri. (2017). *Pemanfaatan Sumber Belajar Dalam Pembelajaran Sejarah Di SMA Negeri 1 Limbangan Kabupaten Kendal*. Semarang. Jurusan Sejarah. Universitas Negeri Semarang
- Lindayanti, dkk. (2013). *Jambi Dalam Sejarah 1500-1942*. Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Jambi
- Miftahurrah. Aliyas. Rahyu Zami. (2022). *Kota Jambi Sebagai Pusat Pemerintahan Kolonial Belanda*. Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Vol.4, No.1, pp. 55-67
- Miftahurrahmat. (2018). *Kota Jambi Sebagai Pusat Pemerintahan Kolonial Dan Pelabuhan Dagang 1906-1942*. Skripsi Departemen Sejarah Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mubyarto, Dkk. (1990). *Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta: Aditya Media
- Nur Laely. (2018). *Sistem pemerintahan Kolonial Belanda Onderafdeling Bonthain 1905-1942*. Universitas Negeri Semarang. Pendidikan IPS, Kekhususan Pendidikan Sejarah Program Pascasarjana
- Putri, Seibahar Sari. (2021). *Sejarah Jambi Masa Keresidenan 1906-1942*. Skripsi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi.
- Sanjaya, Wina. (2010). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta : Prenada Media Group
- Seprina, R. (2021). *Study Perkembangan Perekonomian Jambi Masa Hindia-Belanda (1906-1942) Sebagai Bahan Ajar Pembelajaran Sejarah Berbasis Lokal*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jambi, Vol.1, No.1, pp. 84-93
- Syandra, Suryani Wina. (2021). *Peranan Rio Dalam Pemerintahan Masyarakat Jambi Pada Masa Keresidenan Belanda (1906-1925)*. Skripsi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi